



Buletin Parlementaria

Nomor 988 I/XII/2017 • Desember 2017

**Polandia Harus Berikan
Fasilitas Bebas Visa Schengen
untuk Indonesia**

**Target Penerimaan
Masih Diwarnai Pencitraan**



**BURT Ingin Jasindo Cari
Rumah Sakit Rujukan
Sesuai Standar
Pelayanan**

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



Ketua Tim Kunspek BURT DPR RI Elva Hartati saat tinjau RS Teungku Fakinah, Banda Aceh.

BURT Ingin Jasindo Cari Rumah Sakit Rujukan Sesuai Standar Pelayanan

Ketua Tim Kunjungan Spesifik sekaligus Wakil Ketua BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR RI Elva Hartati menginginkan PT. Asuransi Jasindo untuk mencari Rumah Sakit yang sesuai standar pelayanan. Hal tersebut diungkapkan setelah meninjau RS Teungku Fakinah Banda Aceh.

“Setelah kita lihat rumah sakit ini saya berharap kepada Jasindo untuk berganti rumah sakit lainnya, karena tidak layak untuk Jaminan Pemeliharaan Utama (Jamkestama) bagi anggota DPR RI dan keluarganya,” ujar Elva sesuai mengunjungi RS Teungku Fakinah, Banda Aceh, Senin (27/11).

Tidak layaknya Rumah Sakit tersebut dapat dilihat dari kurang lengkapnya fasilitas yang ada terlebih lagi ruang VVIP di sana tidak sesuai standar pelayanan. Selain tidak sesuai standar, rumah sakit tersebut juga kurang bersih. “Rumah sakit ini selain tidak sesuai standar juga kurang bersih dan tidak layak pakai untuk berobat pejabat

negara. Tempat berobat itu harus bersih pulang sehat, kalau begini ya nanti malah tambah sakit,” tutur Elva.

Untuk itu, Elva berharap Jasindo mengganti rumah sakit rujukan yang berada di Banda Aceh untuk pengobatan anggota DPR RI beserta keluarganya.

Anggota BURT lainnya Rendy M. Affandy juga sependapat dengan Elva Hartati, dirinya cukup prihatin setelah melihat Rumah Sakit Teungku Fakinah karena tidak sesuai harapannya. Pelayanan kesehatan anggota DPR menurutnya harus sesuai standar nasional kesehatan pejabat negara.

“Kebutuhan kesehatan anggota DPR RI itu kan dijamin oleh undang-

undang dan anggarannya cukup tinggi, sehingga *follow up* ke bawahnya juga harus dapat pelayanan yang setimpal,” ujar Rendy. Karena itu pula, BURT akan memanggil Jasindo untuk berdiskusi tentang pelayanan kesehatan Anggota DPR RI khususnya untuk Provinsi Aceh tersebut.

“Kami akan memanggil teman-teman Jasindo dan mempertanyakan kenapa Rumah Sakit Teungku Fakinah ini jadi mitra dari Jasindo sementara ada beberapa rumah sakit di Aceh ini yang cukup bagus yang belum jadi mitra Jasindo itu sendiri,” tambah legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Dengan demikian, nantinya Anggota DPR RI sebagai pejabat negara termasuk keluarganya diberikan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan yang merupakan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PT. Asuransi Jasindo. ■

(aymp) foto.jayediand



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Parlemen Modern Mutlak Agar Demokrasi Tegak

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI menyatakan bahwa tim yang telah dipimpinnya sudah menyusun *blue print* reformasi DPR RI dan ia ingin membawa tim ini melangkah lebih jauh.

Salah satu tonggak keberhasilan DPR RI adalah ketika pada awal Agustus 2017 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), lembaga swadaya dari Jerman, menyatakan DPR RI sebagai parlemen paling terbuka di antara negara Asia Tenggara (ASEAN).

“Secara pengakuan internasional sudah ada, *blue print* juga telah siap. Tim (TIR) ingin melengkapi pemahamannya tentang bagaimana DPR lebih kuat dalam menata *knowledge* (pengetahuan) bangsa sekaligus merawat sejarah kolektif yang telah dilaluinya,” kata Fahri saat melakukan kunjungan ke Parlemen Australia di Canberra, Senin (27/11)

Selama di Australia, delegasi DPR RI akan berkunjung ke Konsul Jenderal RI di Sydney. Kesempatan itu juga akan dimanfaatkan DPR untuk bersilaturahmi dengan staf, komunitas, warga dan mahasiswa Indonesia yang berada di Australia. Setelahnya di Canberra delegasi akan melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Australia Mark Coulton dan *Clerk of The House* David Elder untuk mendiskusikan reformasi & modernisasi parlemen.

Untuk mendapat masukan pengelolaan, diseminasi dan penyebarluasan pengetahuan sebagai sistem pendukung parlemen, delegasi DPR akan berdiskusi dengan Kepala *Australia Parliamentary Library* Dianne Heriot.

Saat pertemuan, Dianne menyampaikan praktek yang dilakukan lembaga yang ia pimpin dalam mengelola dan mendistribusikan pengetahuan berupa hasil riset ilmiah dan riset media kepada seluruh anggota parlemen.

Pertemuan ditutup dengan kunjungan ke *National Democracy Library* dan pertemuan dengan Wakil Dubes RI untuk Australia Derry Aman dan staf kedutaan. Ikut serta dalam kunjungan Arteria Dahlan (FPDIP), Maman Imanul Haq (FPKB), Dadang Rusdiana (F-Hanura), Kepala Badan Keahlian (BKD) DPR RI serta beberapa pejabat Setjen DPR RI, Staf Khusus dan Tenaga Ahli. ■

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Yohannes O.I. Tahapari, S.H., M.Si (Biro Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mujiharijanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,
DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Mujiono

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Remon,

Yuliana Puspita, Ifan, Izzi Fauzul Umam

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

(es), foto : dok/pr



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama dengan Menteri Luar Negeri Polandia, H.E. Mrs Joanna Wronecka di Ruang Rapat Kementerian Luar Negeri, Warsawa Polandia.

Polandia Harus Berikan Fasilitas Bebas Visa Schengen untuk Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengharapkan dukungan Polandia terkait pemberian fasilitas bebas visa Schengen.

“Dengan pemberian bebas visa tentu saja akan mendorong investasi dan pariwisata. Juga akan meningkatkan *“people to people contacts”*” ungkap Fadli Zon usai melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Luar Negeri Polandia, H.E. Mrs Joanna Wronecka di Ruang Rapat Kementerian Luar Negeri, Warsawa Polandia, Selasa waktu setempat (20/11).

Untuk meningkatkan *people to people contacts*, sejak 1987-2015, Pemerintah RI telah memberikan program beasiswa Darmasiswa kepada sekitar 395 mahasiswa untuk bidang studi Bahasa

Indonesia dan Seni Budaya pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

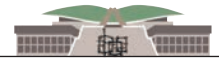
Misalnya, untuk Tahun Ajaran 2015/2016, terdapat 36 pelajar Polandia yang memperoleh beasiswa dimaksud. Disamping program Darmasiswa, sejak tahun 2011-2015 Pemerintah RI juga memberikan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) kepada 6 pelajar/mahasiswa Polandia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia-Polandia sudah menjalin kerja sama bilateral sejak lama.

Pertemuan singkat dengan Menlu Polandia merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan kerja DPR RI ke Polandia. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama antar kedua negara. “Polandia sebagai negara terbesar ke-6 Uni Eropa memiliki sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi dan perdagangan Indonesia,” ungkap Fadli Zon.

Fadli Zon juga berharap ke depan, Indonesia dapat menjadikan Polandia sebagai *gateway* produk dan komoditi unggulan Indonesia, untuk memasuki kawasan UE, khususnya Eropa Tengah. Selain itu, mendorong kerja sama maritim: ToT di bidang industri galangan kapal.

“Saya kira, kedua belah pihak Indonesia-Polandia sudah memiliki hubungan yang mutualisme dimana Polandia menjadi mitra penting bagi Indonesia untuk masuknya ke pasar Uni Eropa. Begitupun Indonesia menjadi mitra penting bagi Polandia karena Indonesia bisa menjadi pintu masuk Polandia ke pintu pasar Asia Tenggara,” tegasnya. ■

(sc), Foto : Kernal/And



Diperlukan Optimalisasi dan Realisasi Kerjasama Bilateral Indonesia-Polandia

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan kerja sama bilateral Indonesia-Polandia sudah terjalin dengan baik, tinggal diperlukan optimalisasi dan realisasi. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan pertemuan terbatas dengan Ketua Senat Polandia HE. Mr. Stanislaw Karczewski di Ruang Senat, Warsawa Polandia, Senin waktu setempat (20/11/2017).

Pertemuan tersebut merupakan kunjungan kerja DPR RI untuk menguatkan diplomasi bilateral Indonesia-Polandia khususnya bidang pertanian, pendidikan, perdagangan dan pariwisata. Dalam kunjungan tersebut, Fadli Zon didampingi Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria dan Anggota Komisi X Anang Hermansyah. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari diplomasi parlemen Indonesia dalam rangka mempererat hubungan bilateral yang telah ada dengan beberapa MoU sebelumnya.

"Pertemuan delegasi DPR RI bersama Ketua Senat Polandia untuk menyampaikan beberapa peluang kerja sama yang perlu diperkuat antara Indonesia-Polandia terutama di bidang pariwisata dan

perdagangan. Juga beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dan Polandia dalam menguatkan hubungan kerjasama bilateral," ungkap Fadli Zon.

"Pertemuan ini juga menjadi forum strategis untuk menyampaikan pentingnya perkuat kerja sama bilateral Indonesia-Polandia. Kami berharap mendapat dukungan Polandia terhadap produk ekspor Indonesia untuk mendapatkan akses pasar UE yang lebih luas. Selain membahas beberapa peluang kerjasama, kunjungan kerja kali ini untuk pemantapan pembentukan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Indonesia-Polandia," tambahnya.

la melanjutkan, pertemuan ini juga sebagai forum untuk melobi senat Polandia dalam pembukaan penerbangan langsung Jakarta-Warsawa dan melanjutkan pembahasan *code sharing* untuk merealisasikan pembukaan jalur

penerbangan langsung Warsawa-Jakarta," paparnya.

Pembahasan penting lainnya yaitu kerja sama dalam bidang pendidikan. Polandia, kata Fadli, memiliki sistem pendidikannya yang berkualitas diantara negara Eropa khususnya pada bidang *sains*, teknologi, kesehatan dan pertanian sehingga tidak menutup kemungkinan negara itu dapat menjadi alternatif baru buat pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studinya ke Eropa.

"Ini kesempatan yang baik buat mahasiswa Indonesia, semacam disertifikasi agar tidak hanya negara-negara barat tertentu yang sudah menjadi tujuan studi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Delegasi DPR RI menggelar pertemuan bersama Delegasi GKSB (Group Kerjasama Bilateral) Polandia bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia Peter F. Gontha. Dalam pertemuan tersebut, Peter F. Gontha meminta bantuan DPR agar aktif melobi senat Polandia demi meningkatkan akses Indonesia ke Uni Eropa. ■

(sc), Foto : Kemal/And



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai melakukan pertemuan terbatas dengan Ketua Senat Polandia HE. Mr. Stanislaw Karczewski di Ruang Senat, Warsawa Polandia.



Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Pemerintah Harus Serius Kaji Dampak Erupsi Gunung Agung

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah minta pemerintah pusat untuk mengkaji seberapa lama dampak erupsi gunung agung di karangasem, Bali akan terus terjadi.

“Pemerintah harus bisa bergerak cepat untuk mengantisipasi hal itu khususnya dalam melakukan evakuasi terhadap warga sekitar serta harus banyak belajar dari kasus erupsi Gunung Sinabung ada di Karo, Sumatera Utara,” katanya, Senin (27/11).

Menurutnya, pemerintah harus secara serius mengkaji apakah letusan gunung agung itu akan terjadi secara permanen seperti beberapa gunung yang ada di Indonesia, seperti halnya Gunung Sinabung yang ada di Karo,

Sumatera Utara. Kalau itu terjadi maka evakuasi harus dilakukan secara permanen.

Lebih lanjut politikus PKS ini mengingatkan, pemerintah harus segera mengambil sikap tegas untuk kebaikan dan keselamatan masyarakat yang terdampak erupsi gunung agung. “Sehingga, masyarakat dapat kembali kepada kehidupan yang normal. Karena saya liat belum ada kejelasan kapan Gunung Agung akan berhenti erupsi,” tandas Fahri. ■

(sc). Foto: Jeka/And



http://static.viva.id/thumbs2/2017/11/28/5a1d115120a13-erupsi-gunung-agung_663_382.jpg/istimewa



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto melakukan kunjungan ke New Zealand dalam rangka memberikan sambutan pada sesi Indonesia Geothermal Center of Excellence di event “New Zealand Geothermal Workshop 2017” di Rotorua, New Zealand.

Dalam kesempatan itu, Agus Hermanto juga melakukan lawatan ke GNS Science (Geological and Nuclear Science Limited).



Kunjungi New Zealand, Agus Hermanto Dorong Potensi *Geothermal*

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat kunjungan ke New Zealand dalam rangka memberikan sambutan pada sesi Indonesia *Geothermal Center of Excellence* di event "New Zealand *Geothermal Workshop 2017*" di Rotorua, New Zealand.

Agus menuturkan, Indonesia dapat mencontoh *benchmark* dari GNS (Geological and Nuclear Science) dalam melakukan riset sumberdaya geothermal.

"Kita menginginkan *single and still single excellent Institute* yang betul-betul menangani geothermal. Sebab, *government drilling* (pengeboran oleh pemerintah) akan menentukan kemajuan panas bumi. Selama ini, *exploration drilling* dilakukan oleh swasta, ke depan akan kita ambil alih. Sehingga *cost* dan *management risk*-nya dapat di cover oleh pemerintah," ujar Agus baru – baru ini di Rotorua, New Zealand.

Saat ini, lanjut politisi Partai Demokrat itu, pihaknya sedang mempersiapkan institusi yang konsen dalam pengelolaan sumber daya alam dengan mengoptimalkan dana COP21 (hibah) dari World Bank terkait *Climate Change*. Dana tersebut nantinya akan digunakan sebagai modal awal untuk melakukan riset ataupun *government drilling*.

"Setelah hasil dari *government drilling*, di situ ada *logging* yaitu alat membaca dan semua material-material dan di analisa dalam laboratorium. Meskipun Badan Geologi di sana (Indonesia) tidak selengkap di sini. Tentu hal itu akan kita koordinasikan, sehingga betul-betul

melahirkan geolog handal di masa yang akan datang," ungkapnya.

Agus mendorong potensi *geothermal* di Indonesia yang baru termanfaatkan 5 persen dari 30 giga watt, dapat di eksplorasi guna meningkatkan kemakmuran lebih luas untuk bangsa Indonesia. Sebab, energi yang mencukupi merupakan rantai pembangunan yang harus dikelola dan dikembalikan kepada rakyat sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

"Kita ingin, cadangan *geothermal* yang tinggi dapat menjadi primadona di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia," tandasnya. ■

(sc), Foto : dok/inf

Pengembangan *Geothermal* Tergantung *Goodwill* Pemerintah



Wakil ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron saat mendampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan, geografi Indonesia dengan New Zealand tidak jauh berbeda karena sama-sama dilintasi oleh *Ring of Fire*. Menurutnya, Indonesia sebagai *Ring of Fire* dapat dimanfaatkan sebagai energi primer yang bisa berkontribusi terhadap ketersediaan energi listrik.

“Kita punya obsesi ke depan untuk elektrifikasi kendaraan dan lain sebagainya. Sehingga akan menjadi energi masa depan yang ramah lingkungan. Sebab, turunan energi ini banyak sekali, selain sebagai sumber energi dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan bisnis lainnya,” kata Herman saat mengikuti event “New Zealand Geothermal Workshop 2017” di Rotorua, New Zealand mendampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto ke New Zealand, belum lama ini.

Herman menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang

dilintasi oleh *Ring of Fire* dapat dipergunakan sebagai sumber energi listrik, karena pulau-pulau kecil dapat diakomodasi dengan daya yang tidak cukup tinggi.

“Misalkan antara 10, 20 atau sampai 100 megawatt, ini bisa ditempatkan dalam satuan pulau-pulau tertentu dengan basis terhadap geothermal,” terang dia.

Terlebih, lanjutnya, geothermal memiliki potensi 29.000 MW baru terpasang sekitar 1.600 MW. PLN sebagai institusi yang ditugaskan negara mengelola sektor hilir di pelistrikan Indonesia diharapkan memprioritaskan membeli sumber energi geothermal.

“Saya kira, ini harus menjadi pembicaraan lintas sektoral dan *stakeholders* di Indonesia. Jangan melihat pada situasi *existing* karena kalau melihat teknologinya memang cukup tinggi, *cost*-nya juga cukup mahal, tetapi bagaimana sekarang *goodwill* dari pemerintah,” ungkap Herman.

Herman menyatakan, pihaknya akan mendorong Undang-Undang Energi Terbarukan segera dibahas dan menjadi prioritas dalam Prolegnas. Kemampuan *renewable* (energi terbarukan) terhadap pengembangan energi listrik ke depan harus mendapat perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Saya yakin bahwa ini akan menjadi alternatif utama di masa yang akan datang. Dan hal utama adalah bagaimana memberikan payung hukum.

Selain Undang-Undang Panas Bumi sudah ada, tentu juga harus ada yang menaungi seutuhnya hingga berbagai kebijakan untuk menuju kepada energi baru terbarukan,” harapnya.

Dalam *workshop* tersebut, selain membahas faktor teknis khusus biotermal yang setiap tahun diselenggarakan di New Zealand, Herman juga berkunjung ke GNS (Geological and Nuclear Science) untuk mempelajari berbagai potensi dan kondisi sebuah negara (*Rest of War*) yang bisa digali menjadi potensi industri listrik.

“Kita bertemu dengan konsultan milik pemerintah, mereka bekerja berdasarkan profesional dan kemampuan yang berpengalaman cukup lama. Menurut saya, elektrifikasi kendaraan dan energi listrik harus diperbesar. Apalagi terkait rasa keadilan seluruh masyarakat Indonesia agar memenuhi kebutuhan listriknya,” tutup Herman. ■

DPR Raih Stand Terinovatif di AMH 2017



Stand DPR RI di Humas Layanan Publik dan Expo 2017 Palembang, 21–23 November 2017.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI meraih penghargaan stand terinovatif dalam acara Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) Kemkominfo yang berlangsung pada Selasa - Kamis (21–23 November) di Sumatera Selatan, Palembang.

“Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini dan kita akan tingkatkan lebih lagi. Semoga di kesempatan berikutnya bisa lebih baik, karena kita harus selalu melakukan inovasi, kreativitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas,” ungkap Kabag Humas Biro Pemberitaan Parlemen Dadang Prayitna usai menerima penghargaan Anugerah Media Humas 2017 kategori pameran, Kamis (24/11), Palembang.

Sebagai stand terinovatif, Dadang menyampaikan Setjen dan BK DPR RI

berhasil mengalahkan 99 booth peserta lainnya dari 53 instansi di seluruh Indonesia.

la melanjutkan, untuk menuju parlemen modern, kehumasan DPR RI akan terus berinovasi dalam melakukan pelayanan, sehingga masyarakat mudah mengakses dan menerima seluruh kegiatan kedewanan meliputi kinerja, program maupun kebijakan DPR.

Selain itu, masyarakat akan dipermudah dalam melakukan pengaduan aspirasi yang bisa dilakukan secara langsung maupun *online* melalui *website* resmi DPR RI.

“Di kehumasan, kita juga sudah banyak melakukan perbaikan dari segala sisi, semoga ke depan kinerja DPR bisa semakin tersosialisasi dengan baik,” jelasnya.

Untuk memeriahkan pameran, Humas DPR beserta tim juga mengadakan perlombaan bintang orator dan permainan “DPR Challenge” agar menarik minat pengunjung. Terbukti, hingga menjelang penutupan pameran, masyarakat semakin antusias mengikuti *games* di stand DPR.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Rosarita Niken Widiastuti Selaku Ketua Umum Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) menyampaikan bahwa SAIK tahun 2017 berlangsung meriah dan diikuti lebih dari 2.500 peserta. ■

(ann,mp), Foto : andri

Komisi VII Apresiasi Pasokan Listrik PLTU Tanjung Kasam Batam

Komisi VII DPR RI mengapresiasi kinerja PLTU Tanjung Kasam Batam yang beroperasi sejak 2012 guna memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Batam. PLTU Batubara satu-satunya di Batam ini memiliki kemampuan pasok lebih dari 90%.



Anggota komisi VII Harry Poernomo.

Jum'at (24/11).

Dalam sambutannya, Harry mengutarakan tujuan Kunspek kali ini selain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Tim Komisi VII DPR RI juga ingin mengetahui sistem Ketenagalistrikan di Kepulauan Riau khususnya wilayah Batam pasca beroperasinya PLTU Tanjung Kasam sejak 2012.

"Bagaimana neraca kelistrikan di Kepulauan Riau khususnya dan wilayah Sumbagut umumnya pada tahun 2017," ungkap Harry Poernomo. Ia juga menambahkan, sejauhmana kinerja PLTU Tanjung Kasam yang berkapasitas 2 x 55 MW mampu mengatasi kebutuhan listrik di Kepulauan Riau selama ini.

Direktur PLN Batam Dadan, dalam paparannya menjelaskan bahwa rasio elektrifikasi di Batam sudah mencapai 97%. Dimana kemampuan PLTU Tanjung Kasam mencapai 2x61 MW. Jumlah pasokan normal 441,3 MW dengan beban puncak *bruto* mencapai 416 MW (Oktober 2017).

Terkait isu pemanfaatan batubara dan lingkungan hidup, Dadan

mengungkapkan bahwa dengan pemakaian 1250-1700 ton perbulan, *Fly ash* dan *Bottom ash* dari proses pembakaran batubara digunakan untuk campuran semen, batako dan paving blok.

"Kami selama ini menjalin kerja sama dengan PT. Semen Bosowa untuk pemanfaatan limbah batu bara menjadi campuran bahan baku semen," pungkas Dadan.

Dalam pertemuan di Kantor TJK Power Batam tersebut dihadiri oleh Perwakilan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direksi PT. PLN (Persero), Dirut PLN Batam, Dirut PT TJK Power Batam dan Perwakilan Kementerian LHK.

Ikut dalam rombongan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI yakni Harry Poernomo (F. Gerindra/Ketua Tim), Tony Wardoyo (F.PDIP), Fayakhun Andriadi (F. Golkar), Sayed Abubakar A. Assegaf (P. Demokrat), Agus Sulistyono (F. PKB), Zulkieflimansyah (F.PKS), Achmad Fariat (F. PPP), Ferry Kase (P. Hanura). ■

(mp.ojje) foto: Naefturji/arf

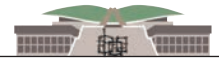
Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Harry Poernomo (F.Gerindra) saat meninjau PLTU Tanjung Kasam Batam,

Komisi I Pertanyakan Keamanan Data Pelanggan Kartu SIM Prabayar

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan keamanan data pelanggan kartu SIM prabayar. Pasalnya, sejak pemerintah mewajibkan pelanggan lama maupun baru diwajibkan untuk mendaftar ulang dengan memakai nomor NIK dan Kartu Keluarga (KK) per 31 Oktober 2017 lalu, muncul keraguan di masyarakat untuk mendaftar atau registrasi kartunya.



Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra.



Demikian dikatakan Supiadin saat rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin.

“Sampai hari ini, masyarakat masih bertanya. Begitu ada pengumuman untuk pendaftaran kartu prabayar beredar di media sosial, dikabarkan Malaysia telah menjual 94 ribu data ke pihak asing. Saya tidak tahu itu *hoaks* atau bukan, tapi itu menyebar di masyarakat, sehingga ada anggapan tidak perlu mendaftar,” kritisi politisi F-Nasdem itu.

Supiadin mendapat info, bahwa Menkominfo Rudiantara menjelaskan, untuk tidak memberikan nama ibu kandung pada saat proses pendaftaran kartu prabayar. Hal itu pun juga ia sampaikan kepada masyarakat di

daerah pilihannya. Menurutnya, hal itu juga menjadi kewajibannya untuk menjelaskan kepada masyarakat.

“Tapi, bagaimana pengamanan data pelanggan yang dilakukan oleh operator, sehingga ada jaminan data tidak dicuri dan diakses pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Halsenada diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Biem Triani Benjamin (F-Gerindra). Ia bersyukur, pendaftaran kartu SIM prabayar telah mencapai 80 juta pelanggan. Menurutnya, ini ditujukan untuk peningkatan kea manan dan kenyamanan pelanggan.

“Pendaftaran dimulai 31 Oktober lalu, dan berakhir 28 Februari 2018 mendatang, setelah itu apalagi? Karena ada kekhawatiran dari masyarakat, kalau tidak mendaftar, bisa hilang atau hangus,” tandas politisi asal dapil DKI Jakarta itu.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Pemerintah memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan mulai tanggal 31 Oktober 2017, guna peningkatan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi. Registrasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity. ■

(sif.mp), Foto: Azka/and

Kepulauan Raja Ampat Perlu Bantuan Sosialisasi Lewat Majalah Parlementaria

DPRD Kabupaten Raja Ampat meminta agar media DPR RI dapat memberikan bantuan sosialisasi tentang keindahan pariwisata gugusan kepulauan Raja Ampat provinsi Papua Barat kepada masyarakat dunia.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD kabupaten Raja Ampat, Reynold M. Bula saat menerima kunjungan tim monitoring dan evaluasi distribusi Majalah dan Buletin Parlementaria Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan Badan Keahlian DPR RI di gedung Rapat Paripurna Dewan Kabupaten Raja Ampat provinsi Papua Barat, Selasa (28/11).

“Setelah mendapat penjelasan tim monitoring, mohon kiranya keindahan Papua Barat khususnya gugusan kepulauan Raja Ampat dapat disosialisasikan melalui media Dewan ini,” kata Reynold yang juga dihadiri oleh tiga anggota dewan lainnya terdiri dari Yosafat Awam, Yapen Willem, dan Abbas Umlati.

Sebelumnya, rombongan tim monitoring dan evaluasi distribusi Buletin dan Majalah Parlementaria yang dipimpin Kasubag Produksi, Mediantoro, menjelaskan bahwa penyebaran Buletin dan Majalah telah didistribusikan ke 34



Biro Pemberitaan Parlemen Bagian Penerbitan Setjen dan BK DPR RI dan PT. POS Indonesia foto bersama dengan Anggota DPRD Raja Ampat, Papua Barat.

provinsi di Indonesia serta 100 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang tersebar di negara-negara sahabat.

Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan peninjauan lapangan ke Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat untuk membuktikan apakah penyebaran distribusi Majalah dan Buletin Parlementaria di terima dengan baik dan tepat waktu di tiga titik distribusi

kabupaten Raja Ampat yaitu kantor DPRD, Kantor Bupati Raja Ampat dan Kapolres.

Dari hasil itu, ternyata penyebaran distribusi Buletin dan Majalah Parlementaria telah sampai ke wilayah Pulau terjauh dari pusat Jakarta, yaitu Kabupaten Radja Ampat di propinsi Papua Barat. ■

(fim) foto: Munchen



Pimpinan Komisi II DPR RI menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Pemerintah terkait RUU Pertanahan.

Komisi II Terima DIM RUU Pertanahan dari Pemerintah

Komisi II DPR RI menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Pemerintah terkait RUU Pertanahan. Penyerahan DIM tersebut dapat dipandang sebagai sejarah baru bagi bangsa Indonesia, setelah 57 tahun berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria.

U sai mendengarkan pembacaan pandangan Pemerintah terhadap RUU Pertanahan yang diwakili oleh Menteri ATR/ BPN, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan akan ada perubahan yang sangat mendasar, pasca Undang-Undang tersebut berdiri. Dimana akan ada pengaturan, pengelolaan, dan kebijakan-kebijakan tentang pertanahan di Indonesia.

"Komisi II DPR akan membentuk Panja RUU Pertanahan. Panja ini akan bekerja melakukan semua tahapan pembahasan," ucap Lukman Edy di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11).

Lukman menjelaskan, Panja RUU Pertanahan nantinya terdiri dari 14 orang



Temui Wapres JK, Ketua BKSAP Kembali Bahas Rohingya

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf bertemu dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) membahas krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf

harus memastikan bahwa semua negara memberikan bantuan. Alhamdulillah, Pak JK sebutkan Indonesia bekerja sama dengan MER-C membangun Rumah Sakit di Rakhine State,” papar politisi dari F-Demokrat ini.

Sementara itu, masih dilanjutkannya, Wapres JK mengatakan sejatinya isu Rohingya merupakan salah satu prioritas pemerintah, namun selama ini negara ASEAN tidak bisa berbuat banyak karena menganut prinsip non-intervensi.

“Seperti yang terjadi di ranah Parlemen, di AIPA kita tidak berhasil karena sifat ASEAN Charter yang konsensus. Karena itu, tadi saya juga mengusulkan agar pengambilan keputusan berdasarkan voting,” sambung Nurhayati.

Menurutnya, mekanisme pengambilan secara konsensus perlu dipertimbangkan kembali. Mengingat, beberapa bidang atau permasalahan harus disikapi lebih fleksibel. Ia menilai, ASEAN perlu mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan nonkonsensus untuk memutuskan sebuah perkara, misalnya dengan melalui mekanisme voting.

Nurhayati menekankan, isu-isu kemanusiaan tidak bisa dihentikan, hanya karena satu negara yang tidak ingin berkompromi. Seperti pembahasan isu kemanusiaan di Rohingya yang dihentikan karena Myanmar tidak menyetujui. Hal ini juga yang terjadi di Sidang AIPA, ketika BKSAP mengajukan resolusi untuk Rohingya, namun disetop karena tidak konsensus.

“Akhirnya, kemarin di AIPA itu, pembahasan politik pun terhenti. Satu sisi, kita juga tidak ingin membawa isu politik, jika isu kemanusiaan di Rohingya tidak dibahas. Nah, hal-hal ini sebaiknya ke depan bisa dipecahkan secara bersama sehingga tidak ada lagi krisis kemanusiaan,” tandas politisi dari dapil Jawa Timur V ini. ■

“Pertemuan dengan Wapres tadi membahas mengenai isu-isu kemanusiaan, sebagaimana kapasitas Pak JK sebagai Wapres dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI),” ujar Nurhayati kepada wartawan usai berdialog secara tertutup di Istana Wapres, Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Kepada JK, Nurhayati menyampaikan bahwa sebelumnya dirinya juga telah mengundang UNHCR untuk membahas perkembangan terakhir bantuan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi atau UNHCR terhadap etnis Rohingya yang berada di Bangladesh maupun di Rakhine State.

Selaku Presiden International Humanitarian Law, Nurhayati mengakui isu Rohingya cukup sensitif. Namun, sisi lain, pemerintah dan masyarakat Indonesia menginginkan agar krisis kemanusiaan di Rakhine segera terselesaikan sehingga tidak ada lagi korban. “Siapapun bisa hidup dengan damai, terlepas dari etnis agama, ras maupun budaya,” imbuhnya.

“Sebagai presiden IHL tentunya saya

perwakilan dari Komisi II dan beberapa Pejabat Eselon I dari Kementerian Agraria, Kemendagri, Kementerian PUPR, dan Kemenkumham sebagai perwakilan dari pemerintah.

“Komisi II akan melakukan serangkaian RDP dan RDPD untuk mendapatkan masukan dari para pakar dan ahli, civitas akademika, Pemerintah Daerah serta berbagai elemen masyarakat, termasuk kunjungan kerja ke daerah-daerah apabila diperlukan. Kunjungan ke daerah atau Provinsi ini, khusus mencari masukan soal RUU Pertanahan,” paparnya.

Selain Menteri ATR/BPN, rapat kerja Komisi II DPR RI dihadiri pula oleh Mendagri, Menteri PUPR, dan perwakilan dari Menkumham. ■

(dep/mp) Foto: Jayadi/land

(ann/sf) Foto: Jaka/and

AKKII Minta Komisi IV Cegah Rencana Moratorium Perdagangan Koral



Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi.

Komisi IV DPR RI menerima aspirasi dari Asosiasi Koral, Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKII) terkait rencana moratorium ijin perdagangan koral yang sempat diwacanakan oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan).

“Kami menerima aspirasi atau keluhan dari AKKII terkait rencana moratorium perdagangan koral, yang menurut mereka selain akan mematikan mata pencaharian mereka beserta enam ribu jiwa didalamnya, juga sekaligus akan menghilangkan devisa negara, plus akan menutup pangsa pasar ekspor koral Indonesia yang notabene akan langsung diambil alih oleh negara lain seperti Malaysia, Fiji, dan Australia,” jelas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi saat memimpin audiensi dengan AKKII di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (28/11).

Dijelaskan Yoga, begitu ia biasa disapa, rencana moratorium itu konon muncul karena adanya dugaan pengrusakan lingkungan

yang diakibatkan pengambilan dan perdagangan terumbu karang tersebut. Karena selama ini yang terekspose media hanyalah tertangkapnya perdagangan koral (terumbu karang) illegal di Amerika serikat. Sementara upaya budidaya yang dilakukan AKKII tidak terekspose.

Pada kesempatan itu, anggota Komisi IV DPR RI, Ichsan Firdaus mengatakan bahwa rencana moratorium perdagangan koral oleh menteri KP (kelautan dan perikanan) itu seperti kebijakan menteri Susi lainnya yang telah lebih dulu diputuskannya, seperti pelarangan penangkapan bibit lobster, pelarangan penggunaan cantrang dan sebagainya.

Hal itu muncul akibat adanya pemahaman yang berbeda dari kata konservasi. Sejatinya menurut Ichsan, makna konservasi itu tidak sebatas pada aspek perlindungan tapi juga pemanfaatan. Tapi apakah pemanfaatannya itu akan menimbulkan kerusakan, maka itulah yang harus lebih dalam ditelusuri.

“Pemaknaan apa arti konservasi, bukan hanya aspek perlindungan, tapi juga pemanfaatan. Seingat saya makna

konservasi ada “8 P”. Tapi apakah pemanfaatannya itu merusak atau tidak itu yang harus ditelusuri lebih dalam lagi. Namun sepertinya Pemahaman Menteri KP ini sama dengan pemahamannya terkait ekspor bibit lobster, pelarangan penggunaan cantrang. Pemahaman ini yang perlu diluruskan. Terkait dengan AKII ini, memang sempat mendengar adanya tuduhan bahwa AKKII tidak melakukan upaya pembudidayaan ataupun perlindungan terumbu karang dan ikan hias,” papar Ichsan.

Menjawab hal itu Ketua umum AKKII, Indra Widjaya mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya sudah melakukan budidaya berupa transplantasi terumbu karang. Bahkan hal itu pun dilakukan tidak hanya di *outdoor*, melainkan juga dalam sebuah kolam khusus atau *indoor*.

Lebih lanjut ia mempersilahkan DPR untuk melihat langsung budidaya terumbu karang yang selama ini dilakukannya sebagai sebuah bentuk pelestarian. Dari sana pihaknya berharap agar Komisi IV DPR mencegah diberlakukannya rencana moratorium tersebut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. ■

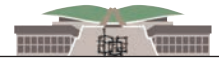
Foto: KresnoIarif (ayu.mp)

Banyak Potensi Kerja Sama Bisa Dikembangkan dengan Sudan



Anggota BKSAP DPR-RI Andreas Hugo Pareira saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Sudan Abdul Azis Abdalla di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI Andreas Hugo Pareira di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (22/11) menerima kunjungan kehormatan Dubes Sudan Abdul Azis Abdalla. Maksud kunjungannya adalah untuk meningkatkan hubungan kedua negara di berbagai bidang juga membahas potensi kerja sama kedua negara yang bisa ditingkatkan.



BURT Pastikan RSUD Permata Bunda Medan Layak Untuk Anggota DPR



Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing saat meninjau RSUD Permata Bunda Medan, Sumut.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing memastikan Rumah Sakit Umum (RSU) Permata Bunda di Medan, Sumatera Utara, layak menjadi rujukan untuk para Anggota Dewan.

“Dari hasil tinjauan tadi, pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit bagus dan pelayanannya sigap. Bahkan jika ada pasien baik itu Anggota Dewan maupun masyarakat biasa, langsung ditangani pihak RSU tanpa harus mengurus administrasi terlebih dahulu,” ungkap Anthon usai meninjau RSUD Permata Bunda Medan, Sumut, Senin (27/11).

Politisi F-PG ini menjelaskan, permasalahan administrasi yang sering dikeluhkan oleh Anggota Dewan jika harus berobat, dipastikan tidak akan terjadi di RSUD Permata Bunda ini.

“Saya rasa Jasindo yang telah memilih RSUD Permata Bunda ini menjadi rumah sakit rujukan sudah tepat. Dan kami juga turut mengapresiasi kinerja Jasindo yang selama ini baik dan positif,” imbuh politisi asal dapil Sumatera Utara itu.

Dalam kesempatan itu, Tim Kunjungan Kerja Spesifik BURT juga menyempatkan meninjau sejumlah fasilitas RS, guna memastikan sejauh mana kesiapan RSUD Permata Bunda dalam melayani kesehatan khususnya untuk Anggota Dewan Peserta Jamkestama.

Kunjungan Spesifik BURT DPR ke Sumut ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua BURT DPR Hasrul Azwar (F-PPP), dan beberapa Anggota BURT DPR, diantaranya Venny Devianti (F-PG), Wihadi Wiyanto (F-Gerindra), Ansory Siregar (F-PPK) dan Nasim Khan (F-PKB). ■

(mp) foto: jakel/and

(jay/mp) foto: jayadi/and

Pasalnya, lanjut Andreas, meski hubungan perdagangan kedua negara telah terjadi dengan volume perdagangan sekitar 70 juta USD, namun masih banyak potensi yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Termasuk komoditas pertambangan, produk-produk tekstil dan makanan seperti Indo Mie, sangat populer di Sudan.

Lebih dari itu, kata Andreas, dari Sudan bisa dikembangkan ke negara-negara Afrika lainnya atau sebagai jangkar untuk meningkatkan hubungan negara-negara sekitar Sudan. Selain bidang ekonomi, hubungan politik termasuk bantuan militer cukup dikenal di Afrika. Seperti prajurit-prajurit TNI yang membantu pasukan perdamaian mereka sangat bangga dengan partisipasi Indonesia. “Itu adalah kesempatan baik untuk membangun hubungan bilateral yang lebih baik dengan negara-negara Afrika,” terang politikus PDI Perjuangan ini.

Selain itu, Dubes Abdalla juga menjelaskan di Sudan ada sekitar 1.300 mahasiswa Indonesia yang belajar di negaranya. “Saya kaget juga dengan informasi itu, dan ini menjadi potensi market Indonesia di Sudan, begitu juga sebaliknya,” katanya.

Untuk itu disarankan adanya eksepsi bisnis Indonesia di Sudan atau pameran perdagangan, sebab selama ini mereka banyak tahu komoditas produk Indonesia, tetapi belum mengetahui secara terencana, terintegrasi untuk mempromosikan produk-produk Indonesia di Sudan. “Saya kira itu ide yang bagus untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Terkait hubungan DPR kedua negara, Andreas mengatakan kerja sama kedua negara bisa lebih ditingkatkan tidak hanya parlemen dengan parlemen, tetapi juga mempromosikan bisnis to bisnis sehingga kerja sama bisa maksimal di berbagai sektor. ■

Kaji Ulang Anggaran Pemeliharaan Jembatan Barelang

Jembatan Barelang merupakan *Icon special* di Batam, baik oleh warga Batam maupun wisatawan dari dan ke Singapura serta negara lain. Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang biaya dengan jelas dan maksimal mengenai pemeliharaan Jembatan Barelang.



Anggota Komisi V Anthon Sihombing bersama Tim Komisi V DPR RI saat meninjau jembatan bentang panjang barelang Batam, Provinsi kepulauan Riau.

“Biaya perawatan sekitar 34 milyar pertahun mereka kategorikan tiga bagian. Apakah perawatannya begitu besar dalam satu tahun, itu berdasarkan penilaian dari mana. Kita minta pemerintah mengkaji ulang jangan pemeliharaan itu biayanya berdasarkan hitung - hitungan kontraktor. Harus dikaji ulang dengan spek yang jelas dengan hitung- hitungan yang jelas dan maksimal pula jangan seperti jembatan yang di Kalimantan,” kata Anthon Sihombing ,

Rabu (22/11).

Pada kesempatan yang sama anggota Tim Syarief Abdullah menambahkan, semua jembatan bentang panjang seperti Barelang menjadi pengawasan DPR bersama Kementerian teknis dalam hal ini Kementerian PUPR.

“Sedini mungkin kita deteksi apa yang menjadi persoalan. Ke depan persoalan ini akan juga berdampak terhadap beban anggaran pemeliharaan dan fasilitas-fasilitas yang memang tidak bisa

ditangani Otorita maupun pemerintahan Kota Batam. Harus kita tarik menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat bisa intervensi terhadap perbaikan pemeliharaan,” kata anggota dari Fraksi Nasdem.

Anggota Komisi V Bahrum Daido mempertanyakan apakah anggaran 32 milyar untuk pemeliharaan Jembatan Balerang akan menjadi kewenangan Kementerian PU. “Kita mau melihat apakah kewenangan penempatan



anggaran 32 milyar cocok untuk kewenangan Kementerian PU. Apakah status jembatan Bareleng ini masuk wilayah Otorita Batam, Badan Pengelola atau masuk kewenangan Pemda,”katanya dengan menambahkan, kalau masuk ke dalam wilayah Pemda ini tidak boleh ada tumpang tindih sebab bertentangan dengan UU Otonomi Daerah. ■

(Ref,mp), Foto: Arief/land

Sidang Pleno APA ke-10 Hasilkan “Istanbul Declaration”

Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) ke-10 di Istanbul Turki resmi ditutup 23 November 2017. Sidang pleno yang dihadiri 29 negara ini menghasilkan “Istanbul Declaration” dan 24 resolusi dari empat Standing Committee. Dalam ‘Istanbul Declaration’ mengadopsi Bali ‘Declaration’ mengenai Sustainable Development Goals (SDGs).

“Alhamdulillah deklarasi Bali tentang SDGs, masuk menjadi keputusan akhir di sidang APA Istanbul. Sebuah capaian diplomatik yang kita harus syukuri dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh,” kata Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar usai penutupan Sidang Pleno APA, Jumat (24/11).

Legislator asal Jawa Timur ini menjelaskan, dengan diadopsinya Deklarasi Bali dalam Deklarasi Istanbul menunjukkan keseriusan Parlemen APA dalam mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

“Forum ini mengadopsi Deklarasi Bali yang mencerminkan komitmen penuh parlemen dunia untuk sadari SDGs. Indonesia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Parlemen Asia atas partisipasi aktif dan dukungan mereka terhadap isu SDGs,” tegasnya.

Rofi menjelaskan, “Istanbul Declaration” yang menjadi kesepakatan utama pada sidang pleno APA kali ini disusun bersama oleh seluruh parlemen anggota APA yang hadir di Istanbul. Sidang Pleno APA juga telah menghasilkan 24 resolusi dari empat Standing Committee. Adapun keempat komisi tersebut adalah Komisi Politik, Komisi Sosial dan Budaya, Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan serta Komisi Staf dan Regulasi Keuangan. Sidang juga menyepakati masuknya organisasi Parlemen CIS dan TURKPA (Turkish Speaking Parliament) sebagai observer pada APA.

Sebelumnya, usulan Indonesia juga masuk pada 5 draf resolusi pada



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar.

Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan. Delegasi Indonesia yang hadir dalam sidang tersebut, Rofi Munawar (Wakil Ketua BKSAP/F-PKS) menyampaikan usulan Indonesia untuk mendorong energi baru dan terbarukan sebagai pengganti energi fosil, mendorong kesetaraan gender dalam program pemberantasan kemiskinan, mengusulkan kerjasama yang erat antar negara-negara Asia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme yang dijalankan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump serta mendorong masuknya “Bali Declaration” sebagai panduan bagi parlemen dalam merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sebagaimana diketahui, di *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* yang diselenggarakan di Bali, Indonesia, pada tanggal 6-7 September 2017 telah dihasilkan Deklarasi Bali untuk mencapai agenda 2030 melalui pembangunan inklusif sebagai dokumen hasil forum parlementer dunia untuk pembangunan berkelanjutan. ■

(sc) foto: DokVarf

Komisi IX Dalami Problem Defisit BPJS Kesehatan



Wakil Ketua Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay.

Maraknya pemberitaan tentang defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin membesar menjadi bahan evaluasi Komisi IX DPR saat rapat kerja dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS. Menurut data yang beredar sampai saat ini defisit BPJS Kesehatan sudah lebih dari Rp 9 triliun, dan diperkirakan bisa bertambah sampai Rp 11 triliun atau Rp 12 triliun pada akhir tahun ini.

Menanggapi permasalahan tersebut, Komisi IX DPR RI sangat berkepentingan untuk mendalami problem defisit BPJS Kesehatan. Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay yang memimpin rapat tersebut meminta penjelasan pihak BPJS Kesehatan. Rapat ini juga menurutnya, untuk mencari solusi bagaimana ke depan agar BPJS Kesehatan tidak lagi defisit, sehingga pertolongan BPJS Kesehatan bisa merata dan maksimal ke semua warga negara yang membutuhkan.

“Kita mau melihat secara mendalam dulu ini, sebetulnya problemnya di mana, kenapa kok selalu defisit, di mana letak kesalahannya, di mana letak mis match-nya itu. Apakah dari sisi pendataan peserta, apakah dari sisi pelayanannya atau dari sisi pembiayaan yang memang

selama ini tidak dimaksimalkan, pembiayaannya belum maksimal karena itu dia menjadi defisit terus, ini semua itu sudah didiskusikan,” papar Saleh di ruang rapat Komisi IX Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11).

Meskipun penyelenggaraan BPJS Kesehatan masih banyak kekurangan di sana-sini, namun Politisi dari Fraksi PAN ini beranggapan peran BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu kekurangan yang selama ini terjadi masih menjadi bahan evaluasi dan koreksi agar ada perbaikan di kemudian hari.

“Maka dari itu Komisi IX punya perhatian khusus karena memang program BPJS Kesehatan ini dengan segala macam kritik yang beredar di masyarakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena banyak orang-orang yang tertolong,” jelas Saleh.

Namun rapat kerja kali ini belum memberikan waktu yang cukup untuk pihak BPJS Kesehatan menjawab pertanyaan-pertanyaan para anggota Komisi IX, oleh sebab itu akan diagendakan kembali rapat lanjutan membahas defisit BPJS Kesehatan.

“Karena itu kita akan mengagendakan diskusi lebih lanjut secara mendalam terkait dengan ini, bentuk komitmen Komisi IX dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan dari BPJS ini. Karena anggarannya besar, ya sayang sekali kalau itu tidak berhasil maksimal untuk masyarakat kita. Saya kira tadi tak cukup waktu karena persoalannya banyak,” papar Saleh. ■

(eko/sc), Foto: Kresno/arf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah.

Komisi X Siap Bantu Sosialisasikan Persoalan Stunting

Indonesia masih menduduki ranking ketiga tertinggi di Asia Tenggara untuk persoalan stunting (masalah kurang gizi kronis). Salah satu prosentase dari jumlah stunting itu adalah 37,2 persen. Kalau ada 10 anak di Indonesia, maka 4 orang anak itu terkena stunting. Demikian terungkap dalam RDPU Komisi X DPR RI dengan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah Yogyakarta bersama Forum Lintas Agama di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Pada paparan yang disampaikan oleh organisasi Nasyiatul Aisyiyah dan Forum Lintas Agama, disebutkan bahwa mereka mempunyai isu dan keresahan yang sama yaitu tentang kondisi negara Indonesia yang saat ini dirasa mengabaikan persoalan stunting.

Organisasi Nasyiatul Aisyiyah dan Forum Lintas Agama berharap, isu stunting itu tidak hanya menjadi persoalan pada dunia kesehatan saja, tetapi seluruh komponen bangsa juga harus ikut memikirkannya.

“Ini adalah persoalan yang serius, tidak hanya darurat pada kondisi ekonomi atau kekerasan, tetapi sudah darurat pada kondisi stunting. Kami ingin menyampaikan dan menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk gerakan zero stunting. Kami bersama seluruh elemen juga sudah mempersiapkan untuk menyampaikan bahwa persoalan stunting adalah juga masalah pendidikan,” ucap koordinator perwakilan organisasi yang hadir.

Menanggapi persoalan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah yang memimpin jalannya pertemuan tersebut menyatakan bahwa Komisi X siap untuk membantu mensosialisasikan terkait persoalan stunting.

Sementara Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjungan menegaskan bahwa masalah pendidikan dan kesehatan memang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. “Secara eksplisit, salah satu penyebab anjloknya peraih medali adalah karena kurang gizi. Soal gizi ini adalah persoalan yang super penting,” tandas Popong Otje, Senin (27/11).

Popong Otje mengatakan, setelah mendapatkan masukan dan informasi, Komisi X punya kewajiban untuk menyampaikan persoalan itu kepada pemerintah sesuai dengan bidang Komisi X.

“Sebetulnya pemerintah bukan tidak ada kemauan politik untuk masalah ini, sejak jaman Orde baru pemerintah sudah berusaha yakni dengan keberadaan Posyandu dan PKK. Itu adalah kemauan politik dari pemerintah untuk menangani masalah ini. Hanya saja begitu masuk Orde Reformasi, Posyandu dihilangkan semua. Padahal untuk program yang bagus, kenapa harus dihilangkan. Oleh karenanya kejadian seperti itu tidak boleh terulang lagi,” pungkasnya. ■

(dep.mp), Foto: arief

DPRD DIY Perlu Tata Tenaga Pakar



Kepala BKD DPR RI Johnson Rajagukguk saat menerima delegasi DPRD D.I. Yogyakarta.

Sebagaimana DPR RI, DPRD juga harus memiliki sistem pendukung dalam pelaksanaan tugas anggota dewan, khususnya dalam kebutuhan penelitian pendalaman pembahasan juga perancangan.

“Memang diperlukan adanya sistem pendukung seperti halnya di DPR RI, semacam badan yang mengorganisasikan kelompok pakar yang ada di DPRD agar lebih tertata menghasilkan kinerja optimal,” ujar Kepala Badan Keahlian Dewan / BKD - DPR RI Johnson Rajagukguk saat menerima delegasi DPRD D.I. Yogyakarta, Senin (20/11).

Kunjungan DPRD DIY dipimpin Wakil Ketua DPRD Dharma Setiawan, merupakan konsultasi terkait penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRD DI Yogyakarta tahun 2018.

Dalam pertemuan ini mengemuka perhatian DPRD DIY akan sistem pendukung kinerja DPRD yaitu para pakar yang dirasa perlu diorganisir. “Di DPRD itu para tenaga ahli ada namun tidak ada badan yang mengkoordinasi. Ada yang melekat di fraksi, ada yang melekat di kelengkapan dewan lain tapi tidak ada yang mengkoordinir,” papar Dharma dengan berharap dari pertemuan menemukan formula untuk DPRD DIY.

Menanggapi hal tersebut, Johnson beranggapan langkah utama yang harus dilakukan adalah mulai mengkoordinasikan kelompok pakar yang ada di DPRD yang memang oleh undang-undang diberikan kepada DPRD.

“Artinya bahwa DPRD itu dapat dibantu oleh kelompok pakar. Di beberapa DPRD memang sudah ada tetapi pengorganisasiannya memang mungkin perlu ditata sehingga pengelolaan tenaga ahli itu bisa dilakukan secara optimal dengan operasional efektif ideal,” tambah Johnson. ■

(Ran.mp), Foto : Jayadi/arf



ASN Setjen DPR Diminta Menjaga Netralitas dan Meningkatkan Profesionalitas

Ketua Korpri Setjen DPR Mardian Umar saat memberikan sambutan acara HUT Korpri ke-46 di Lobby Nusantera DPR RI Senayan, Jakarta

Ketua Korpri Sekretariat Jenderal DPR RI Mardian Umar minta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Setjen DPR RI lebih bisa menjaga silaturahmi antar anggota Korpri dan semakin menjaga netralitas dan meningkatkan profesionalitas di usia Korpri yang ke 46 tahun ini. Mengingat, Korpri merupakan wadah PNS/ASN dalam kedinasan yang harus dapat menjadi perhatian.

“Yang terpenting lagi satu, yaitu memiliki rasa jiwa korsa yang tinggi bagi anggota Korpri. Jiwa korsa yang tinggi dan terukur itu akan memberikan hal positif buat kinerja Setjen,” papar Mardian di sela-sela acara potong tumpeng dalam rangkaian HUT Korpri ke-46 di Lobby Nusantera DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Mengingat arahan tertulis Presiden Joko Widodo adalah untuk terus berinovasi, maka Mardian mengatakan, Korpri sebagai wadah PNS untuk bisa berinovasi saat ini tengah mencari format yang pas untuk melakukan inovasi, mengingat PNS/ASN bukanlah pegawai swasta, dimana gerak gerik dan tata

caranya sudah diatur di dalam Undang-Undang.

Terkait kinerja PNS/ASN di Lingkungan Setjen DPR RI Mardian menilai, sejauh ini PNS di lingkungan Setjen DPR RI memiliki jiwa semangat yang cukup tinggi.

“Kalaupun ada kekurangan ya manusiawi sekali. Mudah-mudahan dengan semangat dan motivasi yang saya lakukan ini selaku Ketua Korpri menumbuhkan jiwa semangat baru. Kemudian juga timbul hal-hal yang positif dalam rangka mendukung kegiatan itu,” katanya.

Keberadaan PNS dalam meningkatkan kinerja, inovasi dan profesionalitasnya



Target Penerimaan Masih Diwarnai Pencitraan

Target penerimaan pada APBN-P 2017 yang dipatok sebesar Rp 1.736 triliun terancam tidak tercapai. Penerimaan 70 persen yang bersumber dari pajak sebesar Rp 1.283,6 triliun itu, masih kerap diwarnai pencitraan daripada menghadirkan potensi penerimaan yang lebih kreatif.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang diterima Parlemen, Senin (27/11). Penerimaan pajak yang melenceng, mengakibatkan target penerimaan dalam APBN-P 2017 ikut melenceng. Sebelum dilakukan perubahan, target penerimaan pajak sebesar Rp 1.498,9 triliun. Target penerimaan pajak pasca revisi turun dibanding realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp 1.284,9 triliun.

"Sebetulnya indikasi melencengnya target penerimaan pajak sudah terlihat sejak September 2017 dimana angkanya hanya berkisar Rp 770,7 triliun atau mengalami pertumbuhan yang menurun sebesar minus 2,79 persen dibanding tahun yang serupa. Dan kita sudah mengingatkan pemerintah atas potensi kesulitan yang dialami pemerintah dalam pemenuhan target penerimaan pajak sampai akhir tahun ini," ujar politisi muda Partai Gerindra ini.

Pemerintah diimbau lebih realistis dalam menentukan target penerimaan di tengah kondisi perekonomian yang serba tidak pasti. Ke depan pemerintah menghadapi banyak tantangan perpajakan. Misalnya, realisasi pajak migas yang menurun. Tahun 2016 saja realisasinya hanya mencapai Rp 44,9 triliun atau hanya 65,3 persen dari APBN-P 2016. Sementara itu, realisasi PPh Migas cenderung sulit meningkat karena melemahnya harga komoditas di pertengahan tahun 2017 ini.

Di sisi lain, lanjut Heri, pelaksanaan reformasi perpajakan nasional belum optimal. Tax ratio Indonesia saat ini adalah yang terendah di dunia, hanya 11 persen. Ujungnya, hal tersebut pasti berimplikasi pada pembayaran beban utang yang jatuh tempo. Belum lagi, gap antara realisasi pendapatan dan belanja, di tengah-tengah realisasi pajak yang terus melenceng, belum bisa dipecahkan pemerintah.

"Akhirnya, semua hal menjadi tak wajar. Celaknya, sebelum melakukan langkah-langkah solutif atas masalah struktural



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

perpajakan tersebut, pemerintah masih saja mematok target yang terlalu optimistis tanpa dibarengi dengan kerja-kerja dalam menghadirkan potensi penerimaan yang lebih kreatif. Sepertinya pemerintah lebih mengejar citra positif ketimbang kerja-kerja yang riil," ungkapnya.

Jadi, masalahnya sebenarnya adalah soal perencanaan yang matang, realistis, yang dilandaskan pada perspektif yang lebih jujur. Untuk itu, pemerintah harus berani bertanggung jawab atas apa yang telah dirancang sendiri. Ini adalah amanat konstitusional. Lebih jauh, pemerintah mesti mengambil pelajaran bahwa betapa penting suatu perencanaan yang matang, realistis, dan jujur, tanpa embel-embel citra.

Ditegaskan Heri, DPR sendiri akan terus melakukan pengawasan atas kerja-kerja pemerintah, terutama terhadap hal mendasar, yaitu reformasi perpajakan nasional untuk meningkatkan tax ratio yang masih sangat rendah. Pada konteks ini, usaha peningkatan kepatuhan bayar pajak harus dilakukan dengan objektif dan adil. Ini untuk menghindari muncul kesan publik yang jelek atas indikasi adanya pengemplang pajak yang didukung pemerintah, sementara masyarakat menengah ke bawah dituntut harus membayar pajak. ■



dalam pekerjaannya tidak lepas atas *supporting* dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang kini sudah berjumlah ratusan di beberapa bagian di Setjen DPR RI. Untuk hal itu Plt Sekjen DPR RI Damayanti meminta PNS/ASN dan PTT tetap bersinergi dalam mengakomodir seluruh kegiatan di DPR.

"Memang PTT dengan ASN agak berbeda ya tetapi bukan berarti mereka (PTT) anak tiri, tetapi kita tetap harus bisa sinergi. PTT pun adalah *supporting* sistem dari DPR sendiri, jadi kita antara ASN dan PTT itu adalah garda belakangnya. Jadi, kita adalah motor penggerak dari kegiatan DPR secara keseluruhan," ujarnya. ■

(ndy/sc), foto: anef/and

(mh/sc), Foto: Anef/and

Komisi VII Terima Keluhan Penambang Kalbar Terkait Smelter



Anggota Komisi VII DPR RI Kathrine Oendoen (kelima dari kanan) saat kunjungan spesifik Panja Minerba di Pontianak, Kalbar.

Anggota Komisi VII DPR RI Kathrine Oendoen menerima aspirasi berupa keluhan dari beberapa perusahaan pertambangan di Kalimantan Barat terkait aturan kewajiban pembuatan smelter yang tercantum dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba.

“Kami (Komisi VII) sengaja mengunjungi Kalbar ini untuk menyerap aspirasi dari para pelaku usaha pertambangan terkait rencana revisi undang-undang no.4 tahun 2009 tentang Minerba yang telah masuk dalam prolegnas. Disini kami mendapat banyak masukan berupa keluhan dari perusahaan pemegang IUP (ijin usaha penambangan). Salah satunya adalah kewajiban membangun smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian minerba - red). Peralnya pembuatan smelter membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara kemampuan keuangan mereka

yang notabene merupakan perusahaan penambang kecil sangat terbatas,” ujar Kathrine saat kunjungan spesifik Panja Minerba di Pontianak, Kalbar, Kamis (23/11)

Dilanjutkannya, kondisi tersebut sangat meresahkan para pelaku penambangan kecil. Bahkan bukan tidak mungkin juga mengancam keberlangsungan usaha mereka. Sementara, tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan tersebut.

Bahkan menurut Sekertaris Dirjen

Minerba Kementerian ESDM, Heri Nurzaman yang ikut mendampingi Komisi VII dalam kunjungan tersebut mengatakan ada sekitar 464 perusahaan pemegang IUP di Kalimantan Barat. Sehingga dapat dipastikan ribuan jiwa menggantungkan hidupnya dari perusahaan-perusahaan tersebut

Terkait hal tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini mengatakan, akan menampung seluruh aspirasi yang masuk untuk kemudian dibahas bersama dengan pimpinan dan anggota Komisi VII lainnya.

“Apakah selanjutnya akan dimasukkan dalam *draft* revisi Undang-undang minerba hal itu tergantung dari pembahasan bersama dengan teman-teman Komisi VII lainnya. Namun yang pasti kami akan berupaya melakukan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Kathrine. ■

(Ayu/mp), Foto: ayu/lat



Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam Ali (tengah) F-PKB dapil Jawa Timur I. saat memimpin pertemuan di PT. Smelting, Gresik, Jawa Timur.

Tidak Ada Komitmen Serious Freeport Bangun Smelter

Ada beberapa hal penting yang didapatkan Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Gresik, Provinsi Jawa Timur. Diantaranya adalah terkait dengan progres pembangunan smelter oleh PT. Freeport Indonesia.

“Kita melihat tidak ada progres fisik yang dilakukan. Meskipun disampaikan telah melalui tahapan-tahapan yang sifatnya administratif, tetapi itu bukan sebuah progres yang bisa di lihat,” ujar Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam Ali saat di Gresik, Jatim, Kamis (23/11).

Hal penting lain yang di tangkap oleh Komisi VII yakni masalah komitmen. Syaikhul Islam menyatakan, tidak ada komitmen yang serius dari PT. Freeport

untuk membangun smelter.

“Dari masalah lokasinya saja, belum ada penentuan. Bahkan perjanjian yang dibuat dengan PT. Petrokimia pun tampaknya di hold,” tandasnya.

Saikhul Islam mengatakan, Komisi VII berharap ada ketegasan dari pemerintah terhadap persoalan itu. Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan dengan satu konsekuensi, kalau tidak membangun smelter dengan progres yang bisa di evaluasi setiap 6 bulan, maka akan dicabut

rekomendasi ekspornya.

“PP Nomor 1 Tahun 2017 yang membuat adalah Kementerian ESDM, walaupun dikonsultasikan kepada Komisi VII. Kita berharap Kementerian ESDM dapat konsisten dengan peraturan yang dibuatnya sendiri. Jangan ada kesan menganakemaskan satu perusahaan dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain,” tuturnya. ■

(dep.mp) Foto: Ryan/and



Tim Kujungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI saat meninjau jembatan Bentang Panjang Bareleng Batam, Provinsi kepulauan Riau, Rabu, 22/11/2017.
(Foto : Arief/man)



Rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin. foto: Azka/man



Setjen DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI memperingati acara HUT Korpri ke-46 di Komplek Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017). Foto : arief